

Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Pada Masa Pandemi Tahun 2020 – 2022

Siti Ishmah Syafitri^{1*}, Irawati^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : sitiishmahsyafitri@gmail.com¹ , ira.yrawatty@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

policy implementation, VAT refund, VAT preliminary refund

ABSTRACT

Land and Building Tax is the highest revenue- generating tax among others in Bekasi City during this pandemic period, as it is controlled and utilized by taxpayers in Bekasi City. Meanwhile, during the pandemic, there was a pensioner tax relief for Civil Servant Retirees and a tax reduction of 20% 50% for taxpayers, as per the extent of the relief. Therefore, during the pandemic, the target set by the Local Revenue Agency was only achieved up to 90%. The purpose of this research is to understand the potential of Land and Building Tax in Bekasi City during the pandemic period from 2020 to 2022, and to identify the efforts made to overcome obstacles in the process of collecting Land and Building Tax, as well as the supporting factors for the collection of Land and Building Tax in Bekasi City. This interview was conducted with 4 informants, namely the BAPENDA Regulator, an Academic, and Taxpayers. The data analysis method used in this research is descriptive, where data was collected through interviews, observations, and documentation methods. The results of this research outline the potential of Land and Building Tax in Bekasi City during the pandemic period from 2020 to 2022.

PENDAHULUAN

Pemerintahan di sebuah negara tidak bisa berjalan jika tidak ada dana untuk membiayai kegiatan pemerintahannya. Hal ini juga berlaku untuk negara Indonesia. Penerimaan negara dalam bentuk pajak tertuang dalam APBN setiap tahunnya. Penerimaan negara dari pajak ini hampir dipastikan meningkat setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada. Demikian juga halnya dengan daerah, untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi kewenangan baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (financial) guna membiayai kegiatan-kegiatannya. Dana tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi. Pendapatan Asli Daerah tersebut berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Sumber penerimaan terbesar di Kota Bekasi di peroleh dari pajak. Hal ini dapat di ketahui dari data struktur APBD kota bekasi tahun 2020 – 2022.

Tabel 1. APBD Kota Bekasi Tahun 2020 – 2022

NO	URAIAN	APBD TAHUN 2020 ANGGARAN	APBD TAHUN 2021 ANGGARAN	APBD TAHUN 2022 ANGGARAN
1	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 5.826.941.089.195	Rp 5.865.891.871.000	Rp 5.296.539.850.449
	HASIL PAJAK DAERAH	163.398.144.985	2.492.954.556.479	2.808.644.102.710
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DI RISAKAN	Rp 29.634.616.482		
	HASIL LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SMI	Rp 1.509.972.962.000	1.841.686.983.386	2.305.779.752.734
	PENDAPATAN TRANSFER	Rp 152.938.932.000		
	HASIL PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT HASIL	Rp 4.146.928.474.865	Rp 34.002.000.427	109.119.795.997
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH		13.162.087.452	12.719.908.304
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SMI	Rp 5.801.941.089.195		
A	BELANJA BARANG DAN JASA			
	BELANJA SUBSIDI BELANJA		343.503.419.214	489.525.146.175
	HIBAH			
	BELANJA BANTUAN SOSIAL		2.982.121.832.529	2.487.916.747.739
	BELANJA MODAL			
	BELANJA MODAL TANPAH		1.650.789.727.908	1.676.545.727.000
B	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN BELANJA MODAL BANGUNAN DAN GEDUNG		1.331.332.104.621	811.370.020.739
	BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN, DAN IRRIGASI BELANJA			

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Dari faktor tersebut sedikitnya kesadaran masyarakat atas kewajibannya sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan, melaporkan, dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu ketika pada masa pandemi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi belum maksimal. Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Bekasi. diketahui bahwa belum tercapainya target dan realisasi penerimaan PBB di Kota Bekasi tahun anggaran 2020 – 2022 :

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi Tahun 2020 – 2022

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI (Rp)	TELUM TERALISASI (Rp)	%
1	2020	Rp 1.585.937.678.852	Rp 1.557.562.367.133	Rp 28.375.311.719,00	98,21%
2	2021	Rp 1.841.686.983.386	Rp 1.715.963.810.423	Rp 125.723.172.963,00	93,17%
3	2022	Rp 2.196.858.077.066	Rp 2.014.837.120.759	Rp 182.020.956.307,00	91,71%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel diatas dapat di ketahui bahwa persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota bekasi terhadap target penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di kota bekasi pada tahun pada tahun 2020 sebesar 98,21%, Pada tahun 2021 sebesar 93,17%, dan pada tahun 2022 sebesar 91,71%. Maka dapat dilihat bahwa data laporan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi pada tahun 2020 – 2022 tidak mencapai target. Di tahun 2021 realisasi PBB belum mencapai target yang telah ditetapkan sebab masih berlangsungnya Pandemi Covid-19, seperti yang di kutip dari (metro.sindonews.com), bahwa Wali Kota mengeluarkan ketetapan berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 973.7/Kep.271- Bapenda/V/2021 mengeluarkan kebijakan kompensasi pembayaran PBB-P2 berupa pengurangan ketetapan PBB dan penghapusan administrasi pembayaran. Kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat Kota Bekasi tetap patuh membayar pajak dan untuk menangani Covid-19 di Kota Bekasi. Sedangkan kontribusi merupakan sumbangan PBB terhadap PAD. Yang di pergunakan agar mengetahui sampai mana pajak daerah memberikan iuran atau sumbangan kepada penerimaan pajak daerah untuk mendukung kemajuan suatu daerah. Maka untuk mengetahui seberapa berkontribusinya pajak daerah tersebut harus dihitung terlebih dahulu.

Dapat diketahui bahwa setiap tahunnya penetapan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota bekasi terus meningkat, akan tetapi realisasi penerimaannya tidak pernah memenuhi target yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Fenomena yang penulis dapat dari pra wawancara penelitian dengan calon informan adalah masih belum tercapainya realisasi pada target yang sudah di tetapkan pemerintah setiap tahunnya. Sebagai kota yang sudah lama berdiri pada tanggal 20 April 1982 kota bekasi merupakan kota yang berkembang dengan luas 210,5 km2 seharusnya realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bekasi mampu mencapai target yang di tetapkan. Dari table I.2 kita dapat simpulkan masih banyaknya wajib pajak yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga pemerintah melakukan berbagai cara

untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), salah satunya setiap pengurusan surat apapun di minta untuk di perlihatkan SPPT PBB apakah sudah lunas atau belum.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak :** Menurut Mardiasmo (2016:3) Pengertian Pajak adalah : “Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.
2. **Pajak Bumi dan Bangunan :** adalah Pajak yang bersifat Objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang di tentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/ atau bangunan. Kondisi dan keadaan dari subjek pajaknya (siapa yang menjadi penanggung atau pembayar PBB) tidak ikut dalam menentukan besarnya pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 ketentuan- ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dengan menggunakan metode menggunakan pendekatan kualitatif dengan kekhususan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian dimana data-data yang dikumpulkan berupa katakata, gambar-gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Bekasi Pada Masa Pandemi Tahun 2020 – 2022.

Tabel 3. Data Realisasi Jumlah Wajib Pajak Terhutang

NO	TAHUN	SPPT	KETETAPAN SPPT	STTS	JUMLAH STTS	JUMLAH WP YANG TIDAK BAYAR	SISA	%
1	2020	40.814	Rp 382.394.663.242	29.152	Rp 278.470.622.816	11.662	Rp 103.924.040.426	72,82%
2	2021	40.422	Rp 372.439.390.126	30.189	Rp 248.999.151.139	10.233	Rp 123.440.238.987	66,86%
3	2022	39.791	Rp 372.739.177.280	29.785	Rp 262.163.242.911	10.006	Rp 110.575.934.369	70,33%

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel diatas, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) semakin menurun setiap tahunnya tetapi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tetap tidak mecapai target. Di tahun 2020 Surat Pemberitahuan Pajak

Terhutang (SPPT) sejumlah 40.814 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) hanya 29.152 persentase hanya mencapai 71,43%. Pada Tahun 2021 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejumlah 40.422 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) hanya 30.189 persentase hanya mencapai 74,68%. Dan pada Tahun 2022 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sejumlah 39.791 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) hanya 29.785 persentase hanya mencapai 74,85%. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menurun setiap tahunnya tetapi persentase yang melaporkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) meningkat setiap tahun, dapat disimpulkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya meningkat.

Tabel 4. Pajak Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 – 2022

NO	PAJAK DAERAH	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	PAJAK HOTEL	Rp 24.405.729.519	Rp 17.816.230.609	Rp 35.785.661.263
2	PAJAK RESTORAN	Rp 227.552.495.152	Rp 268.410.623.997	Rp 362.398.442.259
3	PAJAK HIBURAN	Rp 24.313.137.842	Rp 14.826.539.910	Rp 44.073.469.267
4	PAJAK REKLAME	Rp 30.095.313.090	Rp 60.049.355.092	Rp 73.363.634.362
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	Rp 347.563.195.535	Rp 326.389.815.931	Rp 378.656.303.172
6	PAJAK PARKIR	Rp 28.492.888.175	Rp 27.165.924.689	Rp 37.208.606.544
7	PAJAK AIR BAWAH TANAH	Rp 3.817.326.575	Rp 5.256.373.057	Rp 4.613.961.190
8	PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)	Rp 405.674.111.195	Rp 448.920.284.130	Rp 464.614.298.115
9	PAJAK BBPA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	Rp 388.675.659.576	Rp 434.543.937.328	Rp 420.495.536.652

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah, Diolah Penulis

Berdasarkan Tabel diatas, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di era Pandemi Covid – 19 setiap tahunnya masih mengalami peningkatan. Di tahun 2020 penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 405.674.111.195. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan Rp 43.246.172.935 dan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai Rp 448.920.284.130. Dan pada tahun 2022 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kembali mengalami peningkatan Rp 15.694.013.985 dan jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencapai Rp 464.614.298.115. Dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pendapatan terbesar Pajak di Kota Bekasi, dikarenakan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meningkat setiap tahunnya. Pada pembahasan ini, berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan menganalisis hasil dari penelitian yang berhubungan dengan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bekasi pada masa Pandemi di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Dalam penelitian ini, pengukuran penulis menggunakan Teori Davey (Amelia Yumna & Irawati, 2022) yang terdiri dari 6 Indikator yaitu:

1) Kecukupan dan Elastisitas

a. Kondisi penerimaan pajak di Kota Bekasi ketika masa pandemi.

Di karenakan Kota Bekasi terdampak Covid – 19, maka dari itu pendapatan yang dihasilkan oleh warga Kota Bekasi terganggu dengan adanya Virus Covid – 19 ini. Pajak – pajak yang ada di Kota Bekasi-pun mengalami penurunan. Bisa dilihat dari Tabel 1.2 bahwa Realisasi Tahun 2020 – 2022 yang tercapai hanya 90% dari target dikarenakan terdampaknya Covid – 19. Dari Tabel 1.2 kita bisa lihat bahwa Realisasi yang didapat dari Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun meningkat, tetapi jumlah yang belum terealisasi setiap tahun meningkat juga. Artinya semakin banyak masyarakat Kota Bekasi yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan miliknya.

b. Kesesuaian Target Pajak Bumi dan Bangunan dengan potensi Pajak di Kota Bekasi ketika pandemi.

Sudah sesuai dengan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Tahun 2020 – 2022. Di karenakan sedang Pandemi Virus Covid – 19 pendapatan masyarakat tidak maksimal, jadi Target tidak sebanyak yang tahun – tahun sebelumnya.

- c. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi selama pandemi Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai hanya samapi 90% dari target yang telah ditetapkan dari tahun 2020 – 2022.

“Realisasi Tahun 2020 – 2022 yang tercapai hanya 90% dari target di karenakan terdampaknya Covid – 19. Realisasi yang di dapat dari Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahun meningkat, tetapi jumlah yang belum terealisasi setiap tahun meningkat juga.” (Iwan Tubagus Hartawan, S.E, Pengelola Data dan Potensi Pajak Badan Pendapatan Daerah, 31 Juli 2023)

Kecukupan dan elastisitas adalah kemampuan untuk meningkatkan penerimaan agar dapat menutup kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang dengan sendirinya. Artinya semakin banyak masyarakat Kota Bekasi yang tidak membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan miliknya maka penerimaan pajak juga ikut menurun. Target yang di berikan pemerintah pada Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat sesuai di masa Pandemi Covid – 19 tetapi realisasi masih belum mencapai target dari pemerintah.

2) Keadilan

- a. Pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi selama Pandemi

Sama seperti tahun sebelum Covid – 19 ini melanda, tarif Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada kenaikan. Tetapi ada pengurangan bagi Wajib Pajak yang membayar bulan Mei 2020 sebanyak 15%, Bulan Juni 2020 sebanyak 10%, Bulan Juli dan Agustus 2020 sebanyak 5%.

- b. Tarif progresif yang di berikan BAPENDA kepada Nilai Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tarif yang di kenakan Pajak Bumi dan Bangunan :
 - a) Jumlah Nilai Objek Pajak 0 – 500jt (nilai bangunan) tarif Pajak Bumi dan Bangunan 0,01%
 - b) Jumlah Nilai Objek Pajak 500jt – 1M (nilai bangunan) tarif Pajak Bumi dan Bangunan 0,15%
 - c) Jumlah Nilai Objek Pajak > 1M (nilai bangunan) tarif Pajak Bumi dan Bangunan 0,25%

2. Hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas yaitu kendala atau hambatan yang di hadapi oleh BAPENDA adalah menunda pembayaran, Wajib Pajak tidak di temukan keberadaan lokasinya, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Ekonomi yang menurun sehingga Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak maksimal

3. Upaya yang apa yang dilakukan oleh Badan Pendapatran Pajak Bumi dan Daerah Kota Bekasi dalam meningkatkan potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bekasi?

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan di atas yaitu upaya yang di lakukan BAPENDA Melakukan Proaktif penagihan di masing – masing kelurahan, Melakukan sosialisasi wajib setiap bulan ke tempat masyarakat di balai RW, Memberikan prasarana dan sarana fasilitas untuk, membayar Pajak Bumi dan Bangunan di berbagai Merchant Pembayaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan restitusi pajak pertambahan nilai dalam upaya optimalisasi pembayaran pendahuluan di KPP Pratama Cibitung adalah sebagai berikut:

1. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang paling tinggi penghasilannya dari pajak yang lain di Kota Bekasi selama masa pandemi ini, karena dikuasai dan dimanfaatkan oleh wajib pajak di Kota Bekasi. Sedangkan pada masa pandemi ini ada pemutihan untuk Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan keringanan bagi Wajib Pajak sebesar 20% - 50% sesuai dengan keringanannya. Maka dari itu ketika pandemi Target yang sudah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah realisasinya tidak mencapai. Untuk sarana dan prasarana yang diberikan sudah memadai serta sikap petugas pajak dan pemerintah dalam hal penagihan Pajak Bumi dan Bangunan cukup proaktif, Wajib Pajak juga sudah mudah untuk mengakses SPPT online dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan secara online juga. Potensi Pajak Bumi dan Bangunan sangat membantu pendapatan pemerintah Kota Bekasi, semakin taat Wajib pajak membayarkan Pajak maka semakin banyak juga masyarakat yang akan menikmati fasilitas – fasilitas yang diberikan oleh pemerintah di Kota Bekasi.
2. Kendala yang muncul dalam proses Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi ini dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang sering menunda untuk membayarkan Pajaknya sehingga ada sanksi yang diberikan pemerintah sejumlah 2% dari Nilai Objek Pajak mereka, ketika sanksi itu terus membengkak Wajib Pajak semakin malas untuk membayar di karenakan Pajak Bumi dan Bangunannya sangat tinggi. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan, padahal manfaat Pajak Bumi dan Bangunan bagi masyarakat itu sangat besar di karenakan banyaknya fasilitas dari pemerintah yang bisa kita pakai dari membayar pajak. Seperti Sekolah Negeri, Puskesmas, Stadion, dan beberapa kendaraan umum seperti Kereta, Bus Transjakarta dan masih banyak lagi.
3. Upaya pemerintah terhadap penagihan kepada Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat maksimal seringnya melakukan proaktif penagihan ke masing – masing kelurahan, sosialisasi ke berbagai RW untuk pentingnya membayar Pajak, dan memberikan prasarana dan sarana seperti membayar pajak melalui berbagai macam Merchant Pembayaran Pajak BJB, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, Alfamart, Masago, PT.Pos, Gopay/Go Tagihan, Traveloka, OVO, Blibli, Alfamidi dan Link Aja.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Dwikora, H. (2019). Perpajakan Indonesia sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwaningdyah, M. W. E (2020). Pajak Bumi dan Bangunan. Tangerang : Pustaka Digital Universitas Terbuka.
- Darwin (2010). Pajak Daerah & Restribusi Daerah. Jakarta : Mitra Wacana Media
- Siti Kurnia Rahayu (2020). Perpajakan Konsep, Sistem Dan Implementasi Edisi Revisi. Bandung : Rekayasa Sains.
- Amelia, Y. (2022). BERMOTOR DI MASA PANDEMI (STUDI KANTOR SAMSAT KOTA BEKASI 2019-2021). Bekasi : Perpustakaan Institut STIAMBI Bekasi
- Dwikora, H. Novianita, R. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Yogyakarta : Deepublish.
- Hamidah. Junaidi. Novien, R. Edy, S. (2023). Perpajakan. Batam : Cendikia Mulia Mandiri.
- Agoes, K. (2019) Pajak dan Retribusi Daerah : Konsep dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah. Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Chairil Anwar Pohan (2021) Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Unggul, S. Herman, L. Herman, D. Sundaari. Hardianti. Irawati (2023) Metode Penelitian SUB Rumpun Ilmu Politik. Jambi : Sonpedia Publishing Indonesia.

JURNAL

- Nisa Andriani, Ratih Kumala (2022). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bekasi Tahun 2017-2021. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2, 407 - 417.
- Cristi Devi Darnita, Yenni Mangoting (2014). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN KOTA PALANGKA RAYA. TAX & ACCOUNTING REVIEW, 4, 1 – 10.
- Nara Simba, Lukman M Baga, Dwi Rachmina (2014). STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA BEKASI, Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 13, 57 – 63.
- Amarulia Virdina, P. (2018). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Pt Technical Jaya Abadi Jakarta Dengan Metode Job Order Costing System. Skripsi, 1–29. <http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Amelia, Y. (2022). BERMOTOR DI MASA PANDEMI (STUDI KANTOR SAMSAT KOTA BEKASI 2019-2021).
- Amelia, Y., & Irawati. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021). Jurnal Ilmu Administrasi

- Publik, 2(6), 671–684.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2975/1422>
- Amil, A., Asbur Hidayat, A. H., & Ningsih, N. H. I. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lombok Barat). JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan), 4(4).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1530>
- Andhini, N. F. (2017). Bab IV Metode Penelitian. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. (n.d.). Sejarah Bapenda Kota Bekasi.
- Bapenda.Bekasikota.Go.Id. <http://bapenda.bekasikota.go.id/bapenda-bekasi/visimisi> Darussalam, P., Purwokerto, D., & Hilyatin, D. L. (2020). Pesantrenpreneur (Studi Kasus Di Pondok. 2, 51–76.
- Dewi Purnama, S., & Sapphire Sani, F. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Kuliner Melalui Media Sosial Instagram Pada Grande Garden Café. RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi, 02(02), 33–39.
- Eni. (1967). 済無No Title No Title No Title. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.
- Ii, B. A. B., Literatur, A. T., Perpajakan, A., Smith, A., Four, T., & Smith, A. (2013). tegen prestige. 1990, 13–66.
- Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran, B. I. (2015). Yeyeyeyye.
- Kartikasari, I. A., Estiningrum, D., & Tulungagung, A. R. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Korry, D. I. (2017). Pengaruh Status Kerja Ibu Rumah Tangga Terhadap Coping Stress.
- Repository Unika Sogijapranata, 36–44. <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14757> Kriyantono. (2020). Metode Wawancara. Teknik Pengumpulan Data, i, 16–28 https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). 済無No Title No Title No Title. 9–25.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د. غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 6(August), 128.
- Patton, M. Q. (2009). Pemilihan Informan. Metode Evaluasi Kualitatif, hal.41.
- Rahman, Fuad,Aulia. (2015). ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS ROYALTY PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK
- Oleh: Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 3(April), 49–58.
- Rati, Sunarya, H., & Fitriningsih, A. (2019). Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016. Jurnal Akuntansi (JA), 6(2), 78–92.
- Reza, V., Snapp, P., Dalam, E., Di, I. M. A., Socialization, A., Cadger, O. F., To, M., Cadger,

- S., Proqrampadang, R., Hukum, F., Hatta, U. B. U. B., Sipil, F. T., Hatta, U. B. U. B., Danilo Gomes de Arruda, Bustamam, N., Suryani, S., Nasution, M. S., Prayitno, B., Rois, I., ... Rezekiana, L. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. Bussiness Law Binus, 7(2), 33–48.
http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
- Ridho. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sayyid, M., Sartika, D., & Khotiah, T. (2020). Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan. *Melati Stiekhad*, 1(1), 139– 148.
- Sugiono. (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta, 34–50.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27.
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Amarulia Virdina, P. (2018). Analisis Perhitungan Harga Pokok Produksi Pada Pt Technical Jaya Abadi Jakarta Dengan Metode Job Order Costing System. Skripsi, 1–29.
<http://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/moluccamed>
- Amelia, Y. (2022). BERMOTOR DI MASA PANDEMI (STUDI KANTOR SAMSAT KOTA BEKASI 2019-2021).
- Amelia, Y., & Irawati. (2022). Analisis Potensi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi (Studi Kantor SAMSAT Kota Bekasi 2019-2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(6), 671–684.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2975/1422>
- Amil, A., Asbur Hidayat, A. H., & Ningsih, N. H. I. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Lombok Barat). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(4).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v4i4.1530>
- Andhini, N. F. (2017). Bab IV Metode Penelitian. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. (n.d.). Sejarah Bapenda Kota Bekasi.
- Bapenda.Bekasikota.Go.Id. <http://bapenda.bekasikota.go.id/bapenda-bekasi/visimisi> Darussalam, P., Purwokerto, D., & Hilyatin, D. L. (2020). Pesantrenpreneur (Studi Kasus Di Pondok. 2, 51–76.
- Dewi Purnama, S., & Sapphire Sani, F. (2022). Strategi Komunikasi Pemasaran Kuliner Melalui Media Sosial Instagram Pada Grande Garden Café. *RELASI: Jurnal Penelitian Komunikasi*, 02(02), 33–39.
- Eni. (1967). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., Mi, 5–24.

- li, B. A. B., Literatur, A. T., Perpajakan, A., Smith, A., Four, T., & Smith, A. (2013). *tegen prestige*. 1990, 13–66.
- Kajian Pustaka Dan Kerangka Pemikiran, B. I. (2015). *Yeyeyeyye*.
- Kartikasari, I. A., Estiningrum, D., & Tulungagung, A. R. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Korry, D. I. (2017). Pengaruh Status Kerja Ibu Rumah Tangga Terhadap Coping Stress. *Repository Unika Sogijapranata*, 36–44. <http://repository.unika.ac.id/id/eprint/14757> Kriyantono. (2020). Metode Wawancara. *Teknik Pengumpulan Data*, i, 16–28. https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf
- Maria Dimova, C., & Stirk, P. M. R. (2019). 済無No Title No Title No Title. 9–25.
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., د, غسان, Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Patton, M. Q. (2009). Pemilihan Informan. *Metode Evaluasi Kualitatif*, hal.41.
- Rahman, Fuad,Aulia. (2015). ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS ROYALTY PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK Oleh: Paper Knowledge . *Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Rati, Sunarya, H., & Fitriningsih, A. (2019). Analisis Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Daerah Pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2012-2016. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 6(2), 78–92.
- Reza, V., Snapp, P., Dalam, E., Di, I. M. A., Socialization, A., Cadger, O. F., To, M., Cadger, S., Programpadang, R., Hukum, F., Hatta, U. B. U. B., Sipil, F. T., Hatta, U. B. U. B., Danilo Gomes de Arruda, Bustamam, N., Suryani, S., Nasution, M. S., Prayitno, B., Rois, I., ... Rezekiana, L. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
- Ridho. (2018). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Sayyid, M., Sartika, D., & Khotiah, T. (2020). Analisis potensi dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Lamongan. *Melati Stiekhad*, 1(1), 139– 148.
- Sugiono. (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>

Wijayanta, T. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 216–226. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>

INTERNET

Okny Sugianto, Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan : <https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/>.

Agung Jatmiko (2022), Memahami 3 Sistem Pemungutan Pajak yang Berlaku di Indonesia : <https://katadata.co.id/agungjatmiko/ekonopedia/631aa27502f63/memahami-3-sistem-pemungutan-pajak-yang-berlaku-di-indonesia>.

Fitriya (2023), Cara Menghitung Pajak Bumi Bangunan dan Tarif PBB Terbaru : <https://klikpajak.id/blog/cara-menghitung-pajak-bumi-dan-bangunan-perusahaan/>.

Sandra (2023), Mengenal Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan : <https://www.pajakku.com/read/60c325cceb01ba1922ccadeb/Mengenal-Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>.

Ani Ramdhani (2023), Pengertian Potensi, Jenis, dan Contohnya : <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-potensi/>.

Ani Ramdhani (2023), 15 Pengertian Administrasi Publik Menurut Para Ahli : <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-administrasi-publik/>.

BEKASI, KOTA. (n.d.). Retrieved from BAPPENDA KOTA BEKASI : <http://bapenda.bekasikota.go.id/>.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. (n.d.). Sejarah Bapenda Kota Bekasi. Bapenda.Bekasikota.Go.Id. <http://bapenda.bekasikota.go.id/bapenda-bekasi/visimisi> Rizka Noor Hashela, S. (2020). TOLAK BAYAR PAJAK, PIDANA BERTINDAK. *Pelaihari*. https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/tolak-bayar-pajak-pidana-bertindak

PERATURAN

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNDANG – UNDANG (UU) NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTA PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH UNDANG – UNANG (UU) NOMOR 1 TAHUN 2020